

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan tentang pemerintah daerah yang diberlakukan di Indonesia seperti yang tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berdampak luas terhadap perkembangan suatu daerah. Adanya undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan undang-undang, yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan desentralisasi untuk penataan daerah. Penataan daerah bisa dilakukan dengan cara salah satunya, pemekaran wilayah yang memiliki beberapa tujuan, yaitu: mewujudkan efektifitas pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. (Pasal 31 dan Pasal 32)

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Boyolali terletak antara 110°22' - 110°50' Bujur Timur dan 7°36' - 7°71' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75 - 1.500 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Boyolali terdiri atas 22 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.015,10 km². Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tahun 2019 1.054.362 jiwa dengan kepadatan sebesar 1.039 jiwa/km² dan laju pertumbuhan sebesar 1,37%. Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Boyolali sebesar 2.748 jiwa/km² dan terendah terdapat di Kecamatan Juwangi sebesar 444 jiwa/km². Topografi wilayah di Kabupaten Boyolali bervariasi mulai dari datar, berombak, bergelombang, berbukit, dan bergunung

dengan ketinggian mulai 75 mdpl sampai dengan 1.500 mdpl. Wilayah dengan topografi terendah terdapat di Kecamatan Banyudono, Teras, Boyolali, Mojosongo dan tertinggi terdapat di Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo dan Musuk. Jarak dari kecamatan ke pusat kota Kabupaten Boyolali juga bervariasi yakni mulai 2 km sampai dengan 70 km (BPS Kabupaten Boyolali, 2020).

Menimbang kondisi geografis dan kependudukan yang demikian, maka pemerintah Kabupaten Boyolali melakukan kebijakan pemekaran wilayah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Wonosamodro. Ketiga kecamatan tersebut dimekarkan dari Kecamatan Ampel, Kecamatan Musuk dan Kecamatan Wonosegoro.

Kecamatan Ampel dimekarkan menjadi 2 kecamatan yakni, Kecamatan Ampel sendiri dan Kecamatan Gladagsari. Kemudian Kecamatan Musuk dimekarkan menjadi Kecamatan Musuk sendiri dan Kecamatan Tamansari. Yang terakhir Kecamatan Wonosegoro dimekarkan menjadi Kecamatan Wonosegoro dan Kecamatan Wonosamodro. Dengan pemekaran wilayah ini, maka mengakibatkan adanya beberapa perubahan data statistik kependudukan dan administratif mulai batas wilayah, pemerintahan daerah serta pengelolaan pelayanan dan fasilitas publik. Setelah pemekaran wilayah ini menurut data pada tahun 2019, Kecamatan Ampel saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 40.601 jiwa, Kecamatan Gladagsari memiliki penduduk dengan jumlah 41.852 jiwa, Kecamatan Musuk dengan jumlah penduduk 32.199 jiwa, Kecamatan Tamansari dengan jumlah penduduk 29.225 jiwa, Kecamatan Wonosegoro dengan jumlah penduduk 39.085 jiwa dan Kecamatan Wonosamodro dengan jumlah penduduk 30.250 jiwa. (BPS)

Pemekaran daerah sendiri adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. (Poerwandarminta; 2005). Tuntutan dari pemekaran daerah yang terjadi pada dasarnya karena ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk yang di antaranya mengakibatkan terbatasnya aksesibilitas penduduk sehingga terjadi kesenjangan dalam masyarakat, antara

masyarakat yang posisinya relatif dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang posisinya jauh dari pusat pemerintahan.

Dari berbagai informasi pemekaran daerah Kabupaten Boyolali tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian di daerah pemekaran Kabupaten Boyolali dengan judul “ANALISIS POLA PERSEBARAN PELAYANAN UMUM DI WILAYAH PEMEKARAN KABUPATEN BOYOLALI.” Karena pemekaran daerah Kabupaten Boyolali baru berjalan 2 tahun maka penulis hanya akan memfokuskan penelitian sebaran fasilitas umum di bidang pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan kecamatan saja.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola persebaran pelayanan umum setelah pemekaran daerah Kabupaten Boyolali?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran pelayanan umum di Kabupaten Boyolali?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pola persebaran pelayanan umum setelah pemekaran daerah di Kabupaten Boyolali.
2. Menganalisis semua faktor yang mempengaruhi persebaran pelayanan umum di Kabupaten Boyolali.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi:

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi mengenai pola persebaran pelayanan umum di

Kabupaten Boyolali dan menjadi acuan dalam mengambil kebijaksanaan tentang faktor-faktor apa yang perlu dipertahankan atau diperbaiki dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan akses pelayanan umum di Kabupaten Boyolali.

2. Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pola persebaran pelayanan umum dan menerapkan pendidikan yang telah ditempuh serta sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program kesarjanaan S-1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut tentang pola persebaran pelayanan umum maupun tentang pemekaran daerah, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1. Telaah Pustaka

1.5.1.1. Pengertian Wilayah

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi *et al.* (2006, dalam Susilo, 2008), wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi sering kali bersifat dinamis.

Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumber daya buatan (infrastruktur), manusia, serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian, istilah wilayah menekankan interaksi antarmanusia dengan sumber daya-sumber daya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. (Mahi, 2016)

Nugroho, dkk, (2003) juga menyatakan bahwa dalam menganalisis wilayah

dikenal tiga tipe, yakni (a) wilayah fungsional yang ditandai dengan adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen di dalam dan di luar wilayahnya, wujud wilayah sering dinamakan wilayah *nodal* yang didasari susunan (sistem) yang berhirarki dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan, (b) wilayah homogen, yakni wilayah yang memiliki kemiripan relatif dalam wilayah, dan (c) wilayah administratif, yakni wilayah yang dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Sementara itu, tujuan wilayah (*region*) menurut Sihotang (1997) adalah sebagai suatu usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar dari pada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah dan perencanaan lokal dan nasional. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Boyolali merupakan sebuah wilayah subjektif, objektif, fungsional, homogen dan wilayah administratif.

1.5.1.2. Konsep Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Kesenjangan pembangunan dalam konteks nasional antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Poernomosidi (1979) menyatakan bahwa pengembangan wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam, berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Arus barang sebagai salah satu gejala ekonomi merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah, antar pulau dan antar negara.

1.5.1.3. Konsep Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah kecamatan menjadi beberapa wilayah kecamatan baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan segi pengembangan wilayahnya, calon kecamatan baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya harus seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak muncul terjadi

disparitas yang mencolok pada masa yang akan datang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat, ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru disebabkan jarak pergerakan berubah (P4N, UGM, 1997).

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup (PP No. 129 Tahun 2000). Sementara itu Bintarto, dkk (1979) menyatakan bahwa secara garis besar struktur lingkungan geografi dan berbagai aspek geografi lingkungan, dibagi menjadi dua yakni lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik.

Pemekaran daerah merupakan sebuah upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan daerah. Konsep dasarnya adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dan pemerintah pusat akan membantu dan memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah seperti masalah kebijakan moneter, pembangunan jalan antar kota dan provinsi maupun pemeliharaan dalam sistem pengairan yang melintasi berbagai wilayah. Tekad pemerintah pusat diadakan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri (Suparmoko, 2002).

1.5.1.4. Kriteria dan Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pada pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa

daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dan ayat (4) yaitu pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Maksud dari **syarat administratif** ada persetujuan dari DPRD masing-masing daerah serta rekomendasi menteri dalam negeri. **Syarat teknis** maksudnya meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. **Syarat fisik** paling sedikit 5 (lima) kabupaten atau kota untuk pembentukan propinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, pada BAB III menuangkan syarat-syarat pembentukan, dari pasal 3 sampai dengan pasal 12 dan BAB IV menuangkan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah pada pasal 13. Pengukuran kriteria-kriteria pemekaran wilayah tersebut dapat dilakukan dengan cara: (a) kemampuan ekonomi, maksudnya cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah propinsi atau kabupaten atau kota, (b) potensi daerah, maksudnya tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat, (c) sosial budaya, maksudnya yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, serta kondisi sosial budaya masyarakat, (d) sosial politik, maksudnya kondisi sosial politik masyarakat, (e) jumlah penduduk, maksudnya jumlah tertentu penduduk suatu daerah, (f) luas daerah, maksudnya luas tertentu suatu daerah, (g) pertimbangan lain, maksudnya pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah (Tabel 1).

Tabel 1. Syarat (Kriteria) Pembentukan atau Pemekaran Wilayah

No	Syarat/Kriteria	Indikator
1	Kemampuan ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penerimaan Daerah sendiri
2	Potensi daerah	Lembaga Keuangan Sarana dan prasarana ekonomi Sarana pendidikan Sarana sekolah Sarana transportasi dan komunikasi Sarana pariwisata Ketenagakerjaan terhadap penduduk
3	Sosial budaya	Tempat/ kegiatan institusi sosial Sarana olahraga
4	Sosial politik	Partisipasi masyarakat dalam berpolitik Organisasi kemasyarakatan
5	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk
6	Luas Daerah	Luas daerah
7	Lain-lain	Keamanan dan ketertiban Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan Rentang kendali

Sumber: PP Nomor 129, 2000

1.5.1.5. Pelayanan Umum

Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. (Moenir, 2008)

Sementara menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

1.5.1.6. Sistem Informasi Geografis

Definisi dari Sistem Informasi Geografis atau SIG kemungkinan akan terus berkembang dan bervariasi karena banyaknya para ahli yang mendefinisikannya. Berikut adalah beberapa definisi Sistem Informasi Geografis atau SIG dari beberapa ahli :

1. Marbel *et al* (1983), Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah suatu sistem yang menangani data keruangan.
2. Aronoff (1989), mendefinisikan Sistem Informasi Geografis atau SIG sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. Sistem Informasi Geografis atau SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena di mana lokasi geografi merupakan karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis.
3. Gistut (1994), Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut.
4. Subaryono (2005), mendefinisikan Sistem Informasi Geografis atau SIG sebagai suatu himpunan dari hardware, software, data, dan liveware (orang-orang yang bertanggung jawab dalam mendesain, mengimplementasikan, dan menggunakan SIG).
5. Terakhir, Environmental System Research Institute atau ESRI mendefinisikan, SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi.

Aplikasi Sistem Informasi Geografis atau SIG yang baik adalah apabila aplikasi tersebut dapat menjawab salah satu atau lebih dari 5 (lima) pertanyaan dasar di bawah ini, yaitu :

1. Lokasi, dapat dipergunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu.
2. Kondisi, dapat dipergunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi.
3. Tren, untuk melihat tren dari suatu keadaan.
4. Pola, dapat dipergunakan untuk membaca gejala-gejala alam dan mempelajarinya.
5. Pemodelan, dapat dipergunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang maupun memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu. (Riyanto, dkk, 2019)

Komponen sistem (subsistem) SIG, beberapa subsistem dalam Sistem Informasi Geografis atau SIG antara lain adalah:

1. Input data, pemasukan data yang dilakukan adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atau atribut dari berbagai sumber data.
2. Manipulasi data, proses *editing* terhadap data yang telah masuk.
3. Manajemen data, aktifitas yang berhubungan dengan pengolahan data (menyimpan, mengorganisasi, mengelola, dan menganalisis data) ke dalam sistem penyimpanan permanen.
4. Query, suatu metode pencarian informasi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengguna SIG.
5. Analisis data, ada 2 analisis data dalam SIG, yaitu: a) analisis spasial adalah operasi yang dilakukan pada data spasial, dan b) analisis atribut adalah pengolahan data atribut yang tidak berhubungan dengan ruang.
6. Visualisasi atau output, penyajian hasil berupa informasi baru atau *database* yang ada baik dalam bentuk *softcopy* maupun dalam bentuk *hardcopy* seperti dalam bentuk: peta (atribut peta dan atribut data), tabel, grafik, dan lain-lain.

1.5.1.7. Metode Kernel Density

Kernel density merupakan jenis *density* yang pengertiannya adalah salah satu formula statistik non parametrik untuk mengestimasi kerapatan yang dapat diaplikasikan pada ArcGIS 10. Dalam konteks spasial, kernel density banyak digunakan untuk menganalisis pola persebaran kerapatan dalam suatu area, salah satunya adalah pola persebaran pelayanan umum. (Silverman, B.W, 1986)

1.5.1.8. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, Sumadi, 1983)

1.5.2. Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terkait dengan pemekaran wilayah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. **Khairullah dan Cahyadin (2006)** melakukan penelitian terkait evaluasi pemekaran di Kabupaten Lahat. Tujuan dari penelitiannya adalah (1) mengetahui dan menjelaskan kebijakan pemekaran wilayah dan faktor-faktor yang mendasari pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat, (2) menjelaskan pola spasial berdasarkan kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial, dan (3) membandingkan kelebihan dan kekurangan antara kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Lahat dengan pola spasial atas dasar kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial. Metode yang dipakai dalam penelitiannya adalah menggunakan metode deduktif dengan pendekatan rasionalistik. Analisis data menggunakan metode pola analisis spasial. Hasil dari penelitiannya adalah (1) hasil dari analisis fungsi wilayah, di bagi dua, yaitu: analisis matriks fungsi tidak memasukkan ibu kota Kabupaten Lahat dan analisis matriks fungsi memasukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat, (2) hasil dari pola spasial berdasarkan kriteria fisik/lingkungan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan variabel arahan fungsi pemanfaatan lahan dan kemampuan lahan serta sumber daya lahan menghasilkan dua wilayah pemekaran, (3) hasil dari pola spasial berdasarkan kriteria ekonomi menghasilkan dua wilayah pemekaran, (4) hasil dari pola spasial

menghasilkan 3 (tiga) wilayah pemekaran, (5) hasil akhir penggabungan (*overlay*) dari ke tiga pola spasial (kriteria fisik, ekonomi, dan sosial) pemekaran wilayah Kabupaten Lahat menghasilkan dua wilayah pemekaran yaitu Wilayah I (8 kecamatan) dan Wilayah II (11 kecamatan), dan (6) hasil studi komparasi antara kebijakan pemerintah dan hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan analisis pola spasial dengan memperhatikan kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa pembagian wilayah hasil kebijakan pemerintah Kabupaten Lahat mempunyai banyak kelemahan dibandingkan hasil penelitian

Adryan, Erwin, dan Jafrinur (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya terhadap Wilayah Pinggiran Kota Sungai Penuh. Tujuan dari penelitian ini antara lain (1) mendeskripsikan pertimbangan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci; (2) menganalisis pengaruh pemekaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah Kota Sungai Penuh; dan (3) memahami dampak pemekaran terhadap pembangunan wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan fisik, fungsi wilayah, ekonomi, dan sosial masyarakat. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh setelah pemekaran sebesar 3.13% selama tahun 2010-2016, peningkatan ekonomi tersebut juga didukung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Sektor perdagangan menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kota Sungai Penuh. Pertumbuhan ekonomi kota memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh dengan tersedianya dan kemudahan akses sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan bidang pertanian.

Sementara itu peneliti (2020) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pemekaran Wilayah Berdasarkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Boyolali. Tujuan dari penelitian ini antara lain (1) menganalisis perbedaan aksesibilitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan kantor kecamatan sebelum dan sesudah pemekaran daerah di Kabupaten Boyolali, dan (2) menganalisis semua faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pelayanan publik

di bidang pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan pada pemekaran daerah Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yang disertai dengan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis data menggunakan metode analisis geografi dengan pendekatan keruangan (spasial). Secara detail mengenai perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Khairullah dan Cahyadin (2006)	EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA: Studi Kasus Kabupaten Lahat	(1) mengetahui dan menjelaskan kebijakan pemekaran wilayah dan faktor-faktor yang mendasari pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat, (2) menjelaskan pola spasial berdasarkan kriteria kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial, dan (3) membandingkan kelebihan dan kekurangan antara kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Lahat dengan pola spasial atas dasar kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial	metode deduktif dengan pendekatan rasionalistik	Hasil dari penelitiannya adalah (1) hasil dari analisis fungsi wilayah, di bagi dua, yaitu: analisis matriks fungsi tidak memasukkan ibu kota Kabupaten Lahat dan analisis matriks fungsi memasukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat, (2) hasil dari pola spasial berdasarkan kriteria fisik/lingkungan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan variabel arahan fungsi pemanfaatan lahan dan kemampuan lahan serta sumber daya lahan menghasilkan dua wilayah pemekaran, (3) hasil dari pola spasial berdasarkan kriteria ekonomi menghasilkan dua wilayah pemekaran, (4) hasil dari pola spasial menghasilkan 3 (tiga) wilayah pemekaran, (5) hasil akhir penggabungan (<i>overlay</i>) dari ke tiga pola spasial (kriteria fisik, ekonomi, dan sosial) pemekaran wilayah Kabupaten

				Lahat menghasilkan dua wilayah pemekaran yaitu Wilayah I (8 kecamatan) dan Wilayah II (11 kecamatan), dan (6) hasil studi komparasi antara kebijakan pemerintah dan hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan analisis pola spasial dengan memperhatikan kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa pembagian wilayah hasil kebijakan pemerintah Kabupaten Lahat mempunyai banyak kelemahan dibandingkan hasil penelitian
Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Adryan, Erwin, dan Jafrinur (2018)	Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya terhadap Wilayah Pinggiran Kota Sungai Penuh	Tujuan penelitian ini antara lain (1) mendeskripsikan pertimbangan pemekaran Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci; (2) menganalisis pengaruh pemekaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah Kota Sungai Penuh; dan (3) memahami dampak pemekaran terhadap pembangunan wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, penentuan informan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>	Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pemekaran Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan fisik, fungsi wilayah, ekonomi, dan sosial masyarakat. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Sungai Penuh setelah pemekaran sebesar 3.13% selama tahun 2010-2016, peningkatan ekonomi tersebut juga didukung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Sektor perdagangan menjadi sektor yang potensial untuk dikembangkan di Kota Sungai Penuh. Pertumbuhan

				ekonomi Kota memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah pinggiran Kota Sungai Penuh dengan tersedianya dan kemudahan akses sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan bidang pertanian
Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Barquddin RMQ (2020)	Analisis Pola Persebaran Pelayanan Umum Di Wilayah Pemekaran Kabupaten Boyolali	Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pola persebaran pelayanan umum di Kabupaten Boyolali, dan (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi persebaran pelayanan umum di Kabupaten Boyolali.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data sekunder. Metode analisis data menggunakan teknik analisis spasial (kernel density)	Hasil dari penelitian menyatakan bahwa dalam waktu 2 tahun ini, pemekaran wilayah Boyolali masih banyak kekurangan dikarenakan belum meratanya pola persebaran pelayanan umumnya, ada wilayah yang sebaran pelayanan umumnya tinggi namun banyak wilayah yang persebaran pelayanan umumnya masih rendah.

Sumber: Peneliti, 2020

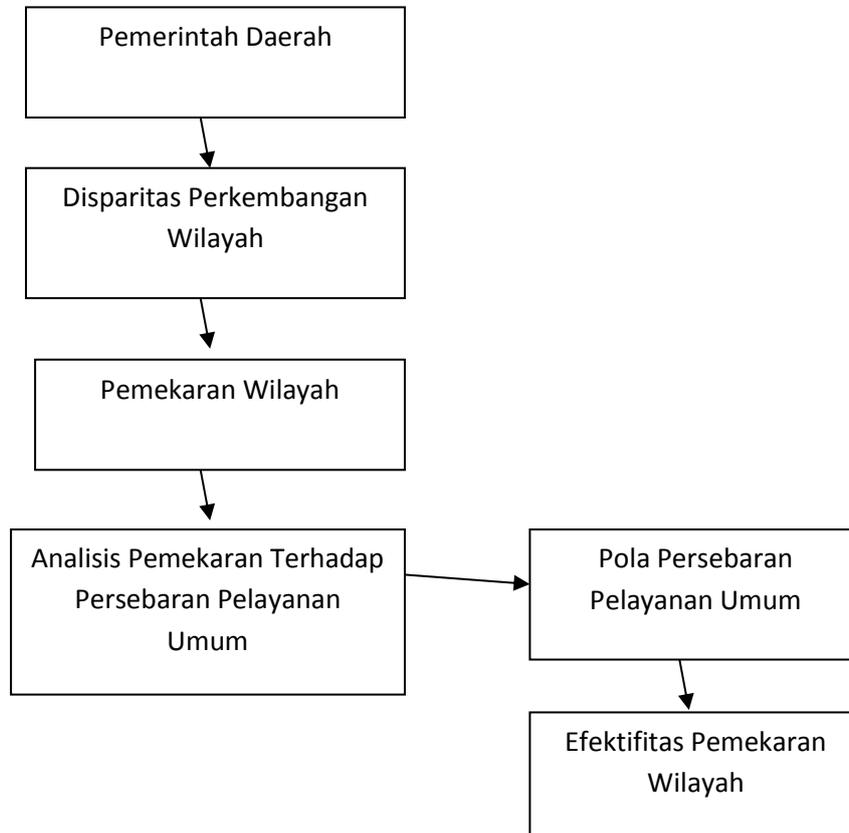
1.6. Kerangka Penelitian

Kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia seperti yang tertuang dalam UU No 23 tahun 2014 berdampak luas terhadap perkembangan suatu daerah. Adanya Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunannya. Salah satu kewenangan yang diberikan antara lain adalah melakukan pemekaran wilayah kecamatan. Walaupun diberikan kewenangan melakukan pemekaran wilayah, pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan pemekaran kecamatan yang berpedoman dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dipertegas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang tercantum di dalamnya syarat pemekaran kecamatan pada pasal 3, yaitu: (a) jumlah penduduk; (b) luas wilayah; (c) jumlah desa atau kelurahan.

Kabupaten Boyolali melakukan kegiatan pemekaran wilayah dengan menambah 3 kecamatan baru, yakni Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro. Tujuan dari pemekaran wilayah kecamatan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 adalah untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan berjalannya program pemekaran daerah tersebut, maka perlu dikaji program tersebut, yakni dengan melakukan analisis. Pada penelitian ini analisis dilakukan berdasarkan data sekunder dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menggunakan data atau variabel pelayanan publik yang meliputi: (a) jumlah fasilitas pendidikan, (b) jumlah fasilitas kesehatan, dan (c) letak kantor kecamatan daerah pemekaran. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah dengan analisis data sekunder serta metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan teknik analisa spasial. Metode analisis data menggunakan analisis geografi dengan pendekatan keruangan. Hasil yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah berupa (a) pola persebaran pelayanan umum di bidang pendidikan, kesehatan dan kantor kecamatan, dan

(b) faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran pelayanan umum tersebut. Secara detail mengenai alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

Sumber: Peneliti, 2020

1.7. Batasan Operasional

- a) Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992, wilayah merupakan ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- b) Pengembangan wilayah dimaksudkan salah satunya untuk menyebarkan pembangunan-pembangunan sehingga dapat dihindarkan terjadinya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan di daerah tertentu. (Sumarmi, 2012)

- c) Pemekaran Wilayah adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. (Poerwandarminta, 2005)
- d) Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. (Arikunto Suharsimi, 1998)
- e) Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. (Moenir, 2008)
- f) Sistem Informasi Geografis atau SIG menjadi salah satu metode dalam menyelesaikan permasalahan suatu fenomena di ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini disebut dengan geospasial yang meliputi lapisan-lapisan di sekitar atau di atas permukaan bumi. (Longley *et al*, 2005)